



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TA. 2023

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN
2024

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023. LKjIP OPD Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pertanian telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purwodadi, Januari 2024

KERALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN



Dr. SUNANTO, S.ST., MP.

Pembina Tk. I

NIP. 19680507 199403 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023.....	25
BAB IV. PENUTUP	72

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dan Rencana Kinerja 2023 melalui pemanfaatan potensi sumber daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berdaya saing, adil, demokratis dan berkelanjutan.

Indikator kegiatan yang berisi target capaian, sasaran dan realisasi pada setiap kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, telah dinilai melalui pengukuran kinerja dari setiap program dan kegiatan mulai input, output, outcome, benefit dan impact dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Hasil penilaian yang dapat diukur adalah indikator input, output dan outcome. Hasil pengukuran input dan output rata-rata mencapai 100%, hal ini membuktikan bahwa penggunaan dana dan daya yang tersedia telah digunakan dalam bentuk kegiatan yang sesuai rencana.

Ada beberapa sasaran yang belum optimal dan setelah dianalisis ternyata ada kaitannya dengan aspek pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap / perilaku petani. Tingkat pendidikan petani masih rendah, tingkat sosial ekonomi yang kurang mendukung dan banyaknya urbanisasi bagi sebagian besar generasi muda petani karena kurang tertarik dengan usaha bidang pertanian di pedesaan serta kelembagaan tani sedang dibenahi sehingga sasaran belum tercapai seperti yang diharapkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu strategi pemecahan yaitu perlunya peningkatan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini mengingat bahwa proses pemberdayaan

masyarakat merupakan proses mendidik yang membutuhkan waktu yang lama dan secara bertahap dengan berbagai metode secara bersinergi serta diperlukan pendekatan yang lebih baik.

Belajar dari permasalahan yang ada untuk masing-masing kegiatan akan menjadi masukan yang baik untuk evaluasi / perbaikan langkah-langkah ke depan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan ekonomi nasional, sehingga perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan karena dapat mempengaruhi banyak aspek yaitu ekonomi, ekologi, sosial, lingkungan, pengembangan wilayah. Sektor pertanian menjadi penting karena potensi sumberdaya alam yang cukup besar, banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dan pertanian juga yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Sektor pertanian identik dengan ketersediaan pangan atau ketahanan pangan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu indikator keberhasilan program pembangunan di bidang pertanian, sehingga ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan dalam pertanian, mengingat potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia masih memungkinkan untuk dioptimalkan.

Di Kabupaten Grobogan, sektor pertanian mempunyai peranan penting. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Grobogan bermata pencaharian sebagai petani. Kabupaten Grobogan dengan potensi sumberdaya alam yang cukup besar dapat terus dikembangkan untuk kegiatan budidaya pertanian. Kabupaten Grobogan sendiri merupakan penyangga pangan nasional untuk komoditas padi, jagung dan kedelai.

Namun, terdapat banyak tantangan dan hambatan di sektor pertanian diantaranya adalah konversi lahan pertanian, buruh tani semakin langka, dan juga pemasaran hasil pertanian. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka diupayakan melalui program dan kegiatan yang disusun melalui proses perencanaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Grobogan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan onersi terakhir yang seharusnya terwujud;
5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dinas pertanian Kabupaten Grobogan sebagai instansi penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selaku salah satu perangkat daerah memiliki keawajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan teknis, pengelolaan dan pembangunan bidang pertanian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu, laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja baik dalam bentuk regulasi, distribusi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive sehingga dalam menjalankan tugas dan perannya dapat sesuai dengan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun 2023.
5. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

13. Permentan Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (Sakip).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Grobogan No. 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

C. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Utama

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan No. 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

2. Tugas Pokok

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuannya di bidang pertanian yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, melaksanakan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan administrasi, ketatausahaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya dan fungsinya tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai bahan arahan operasional;
- b. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- c. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- h. menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. menyelenggarakan pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- q. menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
- r. menetapkan izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPT dan kelompok jabatan fungsional;
- t. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- u. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Struktur Organisasi

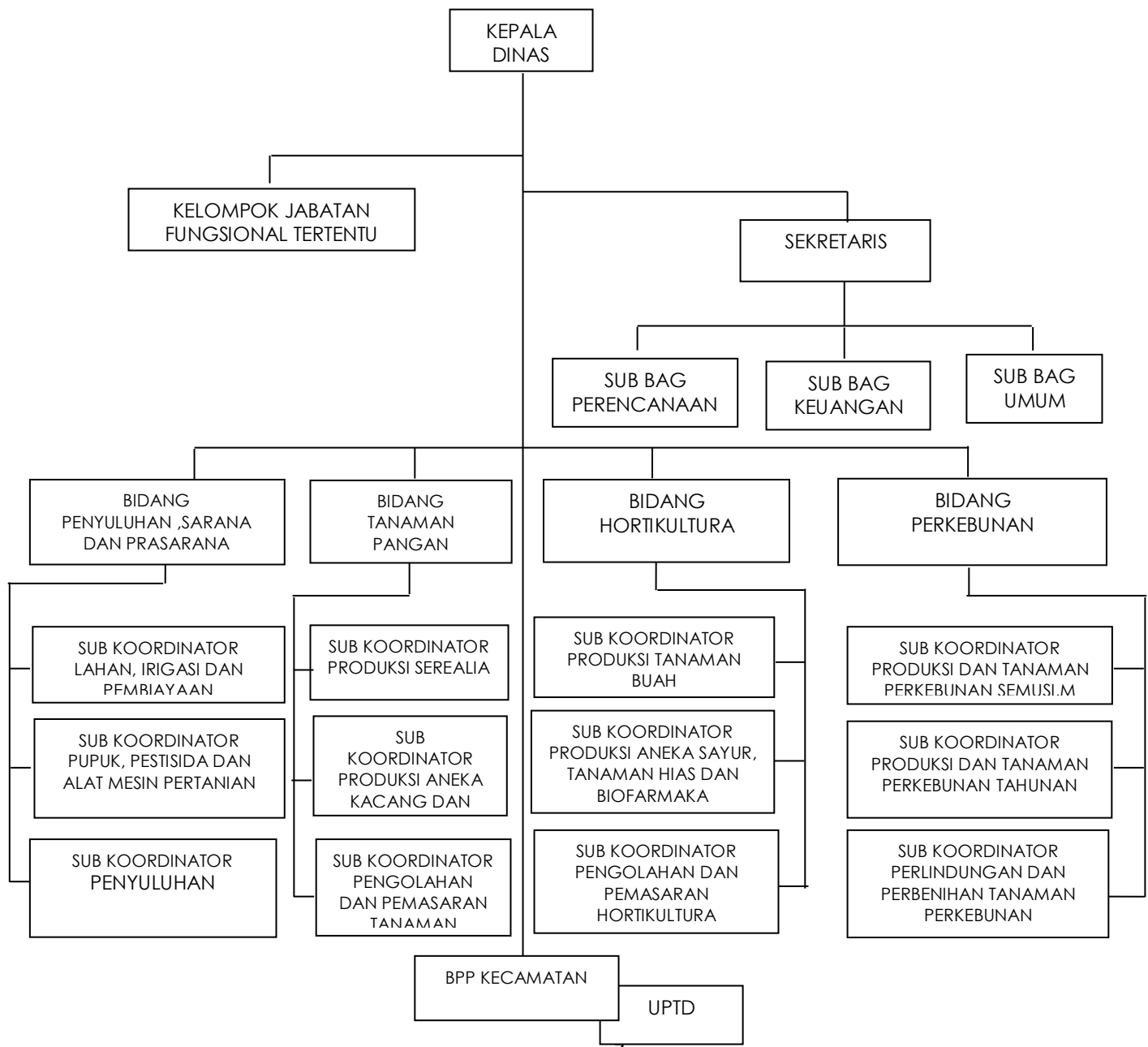
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan Organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi tentang pengendalian dan interaksi antara pimpinan dan bawahan serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan membentuk susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum
- c. Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 - Sub Koordinator Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
 - Sub Koordinator Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
 - Sub Koordinator Penyuluhan
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - Sub Koordinator Produksi Serealia
 - Sub Koordinator Produksi Aneka Kacang dan Umbi
 - Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan
- e. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 - Sub Koordinator Produksi Tanaman Buah
 - Sub Koordinator Produksi Aneka Sayur, Tanaman Hias dan Biofarmaka
 - Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura
- f. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - Sub Koordinator Produksi dan Pemasaran Tanaman Perkebunan Semusim

- Sub Koordinator Produksi dan Pemasaran Tanaman Perkebunan Tahunan
 - Sub Koordinator Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Perkebunan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pembenihan Padi.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium.

Adapun struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tercantum dalam gambar 1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.



5. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

Susunan kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2023, perincian pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.1.1 Perincian Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	
	a. SD	-
	b. SMP	-
	c. SMA	37
	d. Sarjana Muda (D I – D III)	10
	e. S 1 dan D IV	126
	f. S 2	13
	g. S 3	1
Jumlah		187
2.	Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan	
	a. Golongan I	-
	b. Golongan II	8
	c. Golongan III	37
	d. Golongan IV	10
	e. Kelas V	8
	f. Kelas VII	2
	g. Kelas IX	65
	h. Tenaga Harian Lepas (THL)	57
Jumlah		187
3.	Pegawai berdasarkan Jabatan	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	5
	c. Eselon IV	5
	d. Eselon V	-
	d. Staf	8
	e. Pejabat Fungsional (PNS + PPPK)	111
	f. Tenaga Harian Lepas (THL)	57
Jumlah		187

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Grobogan Tahun 2023

Sarana dan Prasarana :

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Grobogan Tahun 2023

Aset Brigade Alsintan

No	Nama Barang	Jumlah	
1	2	3	
1	Traktor Roda 4	11	Unit
2	Traktor Roda 2	101	Unit
3	Rota Tanam	1	Unit
4	Cultivator	6	Unit
5	Pompa Air 2"	20	Unit
6	Pompa Air 3"	111	Unit
7	Pompa Air 4"	20	Unit
8	Pompa Air 6"	8	Unit
9	Rice Transplanter	22	Unit
10	Alat Tanam Jagung Dorong	10	Unit
11	Corn Planter	2	Unit
12	Corn Sheller	12	Unit
13	Hand Sprayer	187	Unit
14	Corn Combine Harvester Besar	5	Unit
15	Combine Harvesters Multi	2	Unit
16	Combine Harvesters Besar	2	Unit
17	Combine Harvesters Sedang	4	Unit
18	Combine Harvesters Kecil	3	Unit
19	Power Thresher	15	unit
20	Power Thresher Multiguna	164	unit
21	Motor Roda Tiga	4	unit

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Grobogan Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang berisi penjabaran visi misi Pemerintah Daerah dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan telaahan maupun review atas isu-isu strategis maupun dokumen perencanaan lainnya maka permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan pertanian sebagai permasalahan utama dari Dinas Pertanian adalah “Belum optimalnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan” dengan penjabaran sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang berpotensi terhadap pemanfaatan pengembangan lahan tanaman padi, jagung dan kedelai, pemanfaatan lahan secara intensif terutama lahan potensial di daerah – daerah sentra untuk dapat mendukung

keberhasilan produk tanaman pangan. Jumlah produksi padi dalam kurun waktu lima tahun (2018-2022) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Produksi padi yang cukup besar tersebut diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Grobogan sebagai kabupaten yang surplus beras. Produksi jagung dalam kurun waktu yang sama mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kedelai meskipun mengalami penurunan produksi pada periode 2018-2022. Komoditas hortikultura yang dikembangkan di Kabupaten Grobogan antara lain, bawang merah, cabe besar, cabe rawit, semangka, jambu air, blimbing, pisang dan melon. Pada lima tahun terakhir, berbagai komoditas hortikultura tersebut mengalami fluktuasi produksi. Namun terdapat tren peningkatan produksi komoditas cabe rawit.

Kabupaten Grobogan juga memiliki sumber perekonomian masyarakat dari sektor perkebunan. Produksi di sektor perkebunan di Kabupaten Grobogan meliputi tembakau, tebu dan kelapa. Produksi sektor perkebunan di Kabupaten Grobogan menunjukkan fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Produksi tembakau menunjukkan peningkatan tertinggi pada tahun 2020, dimana produksi mencapai 3.308 ton rajangan kering.

Sedangkan komoditas tebu menunjukkan produksi yang relative meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan luasan areal yang bertambah secara signifikan.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Belum optimalnya indeks pertanaman dan luas tambah tanam;
3. Belum optimalnya manajemen dan kelembagaan usaha tani;
4. Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta dampak perubahan iklim;

5. Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air untuk kebutuhan pertanian;
7. Kurangnya jumlah penangkar dan produsen benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8. Semakin kurangnya sumber daya manusia petani pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan generasi muda kurang tertarik mengembangkan usaha di bidang pertanian;
9. Masih kurangnya penerapan modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
10. Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian dan perkebunan
11. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar;
12. Masih rendahnya perlindungan terhadap petani.

Visi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026 disebutkan bahwa pembangunan Kabupaten Grobogan diarahkan pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Visi :

“Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya”

Dimana Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian berupaya mewujudkan visi tersebut melalui Program dan Kegiatan.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan menetapkan misi-misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Membangun infrastruktur sesuai dengan potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan resiko bencana;
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian visi dan misi di atas, maka Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjadi berperan pada misi ke 3 (tiga) yang mengarah pada bidang pertanian, yaitu Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.

TUJUAN DAN SASARAN

Prioritas pembangunan pada bidang Pertanian yaitu diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut dilakukan melalui Menumbuhkan kembali geliat perekonomian masyarakat melalui optimalisasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, penguatan dan pemberdayaan UMKM yang didukung oleh lembaga keuangan mikro dan koperasi yang berkualitas, penguatan sektor perikanan dan pertanian secara luas, pengembangan kawasan dan sentra industri, serta

pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat dan industri kreatif.

Tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian mempunyai keterkaitan dengan pencapaian misi yang ketiga Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing dengan tujuan dan sasaran antara lain :

Tujuan

Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di Perangkat Daerah.

Sasaran

Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya indeks pertanaman (IP);
2. Meningkatnya luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan dan atau rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Melaksanakan pengawasan penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida;
3. Meningkatkan penyediaan benih dan bibit berkualitas sebagai penjamin penggunaan benih dan bibit bermutu di masyarakat;
4. Meningkatkan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia hayati yang ramah lingkungan;
5. Mendorong penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendukung modernisasi pertanian guna peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6. Mencegah, mengendalikan dan memantau organisme pengganggu tanaman (OPT);
7. Mendorong peningkatan luas tambah tanam melalui intensifikasi usaha tani dan penerapan teknologi spesifik lokasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bidang pertanian, kelembagaan dan pengolahan hasil pertanian;
9. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM pertanian;
10. Meningkatkan kapasitas dan kewirausahaan pelaku agribisnis pertanian.

Pokok-pokok kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026 pembangunan Kabupaten Grobogan bidang

pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai berikut:

1. Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan azas 6 tepat (tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat) serta peningkatan koordinasi pengawasan dan pembinaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
3. Meningkatkan produksi dan penyediaan benih dan bibit berkualitas, pembinaan dan pengawasan kelompok penangkar benih, pengembangan jaringan benih antar lapang, pengembangan laboratorium kultur jaringan;
4. Peningkatan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia hayati yang ramah lingkungan;
5. Penyediaan alat dan mesin pertanian tingkat kelompok tani dan gabungan kelompok tani, pengelolaan brigade alsin, peningkatan pembentukan kelembagaan dan kapasitas UPJA menuju kelas profesional;
6. Pengembangan laboratorium organisme pengganggu tanaman (OPT), pengendalian hama terpadu, pengembangan pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alami yang ramah lingkungan;
7. Peningkatan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peningkatan penerapan teknologi pertanian melalui demplot, demfarm, kaji terap, pelatihan demonstrasi, simulasi;
8. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bidang pertanian, kelembagaan dan pengolahan hasil pertanian;
9. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM pertanian;

10. Peningkatan kapasitas dan kewirausahaan pelaku agribisnis pertanian.

Kebijaksanaan

Kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1. Mengembangkan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari hulu sampai hilir.
2. Mengembangkan sumber daya manusia petugas dan petani serta kelembagaan kelompok tani.
3. Menyediakan sarana dan prasarana usaha pertanian.
4. Tanggap terhadap situasi dan kondisi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terkini.
5. Mengembangkan layanan informasi pertanian.
6. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian dengan memanfaatkan teknologi informasi,
7. Website dan media sosial lainnya.

Program

Program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan ditetapkan sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- Program Perizinan Usaha Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan demikian, PK merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Dinas, Eselon III, dan Eselon IV. PK ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas pada saat pelaksanaan Rapat Kerja. PK memuat peta strategi, sasaran strategis, IKU, dan target IKU yang menjadi tanggung jawab masing-masing Bidang.

Adapun perubahan dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dengan Kepala Daerah Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TAHUN 2023
1.	Meningkatnya indeks pertanian (IP)	Peningkatan indeks pertanian (IP)	270,5 indeks

2.	Meningkatnya luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	Luas tanam komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan	250,121 ha
3.	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Prosentase pertumbuhan kelompok tani naik kelas	2%
4.	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan public didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD Indeks kepuasan masyarakat (IKM) perangkat daerah	B(68) B (77,20)

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 mengelola anggaran belanja langsung sejumlah Rp. 63.556.116.695,- (Enam puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang akan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan antara lain:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	14.866.593.850
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.818.100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.871.466.000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.660.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.708.133.500
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	977.016.250
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.500.000
II.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.829.874.430
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8.165.995.280

No	Uraian	Anggaran (Rp)
2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.663.879.150
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	29.394.125.495
1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.989.839.200
2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	25.404.286.295
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	332.985.000
1	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	332.985.000
V.	Program Penyuluhan Pertanian	6.132.537.920
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	6.132.537.920
JUMLAH		63.556.116.695

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 atas target rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Penetapan rencana kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Grobogan pada awal tahun 2023.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang mencakup perhitungan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

Bab ini disajikan uraian tentang pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja tujuan dan sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, capaian kinerja pemerintah daerah provinsi dan pemerintah. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi terkait yang telah dicapai.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023, serta yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Penghitungan pencapaian rencana dan tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan, termasuk merumuskan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran.

Sesuai realisasi capaian kinerja, dilakukan pengkategorian capaian kinerja, berdasarkan skala pengukuran kinerja seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Persentase Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	$\geq 91\%$	Kinerja Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Kinerja Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Kinerja Cukup
4.	$51\% \leq 65\%$	Kinerja Rendah
5.	$< 50\%$	Kinerja Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017(lampiran).

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran (persentase penyerapan anggaran) tiap-tiap sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran, dan
2. **Tidak efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari pelaksanaannya pada tahun yang bersangkutan.

Gambaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dengan capaian.

Capaian kinerja Dinas Pertanian disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021– 2026.

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini dilaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Sesuai misi Bupati Grobogan yang ketiga yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.

a. Tujuan

Meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan. Hasil pengukuran kinerja tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dianalisis sebagai berikut:

Target dan Realisasi Tujuan
Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator	Sat.	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	% Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor ekonomi	Pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	1,7	3,37	198,2	1,7	198,2

	unggulan daerah							
2.	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani	Nilai	101,66	106,73	104	102,61	104
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (69)	B (69)	100	BB(75)	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, realisasi capaian target dan tujuan Dinas Pertanian adalah Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah. Indikator dari tujuan rencana strategis Dinas Pertanian adalah pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan nilai tukar petani. Capaian kinerja indikator pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,7 % dengan realisasi 3,37% (198,2 % dari target) artinya kinerja sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Sementara itu capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi dari target sebesar B (69) tercapai yaitu B(69) untuk tahun 2023 artinya kinerja sasaran tersebut juga tinggi. Nilai tukar petani di tahun 2023 sebesar 106,73 (104 % dari target).

a. Realisasi Sasaran Tahun 2023

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2020	Target		Realisasi 2023	Prosentase Capaian (%)
					2023	Target Akhir RPJMD		
Meningkatkan Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura	Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP)	peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	indeks	269	270,5	272	272,5	100.7

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Kondisi Awal 2020	Target		Realisasi 2023	Prosentase Capaian (%)
					2023	Target Akhir RPJMD		
dan perkebunan sebagai wujud kontribusi pada Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah.	Meningkatnya Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	235.530	250.121	265.817	341.429 Ha	136,5
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian	Prosentase jumlah kelompok tani utama	%	1,2	2	2	2,12	106
	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	Nilai SAKIP OPD	B (60)	B (68)	BB (73,5)	B (64,25)	94,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai IKM OPD	B (67,70)	B (77,20)	B (79,70)	B (78,31)	101,4

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian adalah Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP), Meningkatnya Luas Tanam Komoditas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian. Secara umum, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dapat mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

3.2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Kegiatan dinilai efisien bila:

- Target output berhasil diwujudkan dengan menggunakan kuantitas input (biaya) yg lebih kecil dari rencananya.
- Kuantitas input tertentu menghasilkan output yg lebih besar dari standar (rencana).

- Input digunakan untuk menghasilkan target output yg direncanakan (tidak terdapat pemborosan sumber daya)

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$

Hingga akhir Tahun 2023, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	14.866.593.850	13.914.055.971	93.59
II.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.829.874.430	12.022.199.580	93.70
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	29.394.125.495	29.048.329.817	98.82
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	332.985.000	328.531.100	98.66
V.	Program Penyuluhan Pertanian	6.132.537.920	6.002.546.635	97.88
JUMLAH		63.556.116.695	61.315.663.103	96.47

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 61.315.663.103,00 dari anggaran Rp 63.556.116.695,00 atau realisasi sebesar 96.47%. Realisasi anggaran sebesar 96.47% maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut, walaupun masih tersisa anggaran sebesar Rp 2.240.453.592,00 atau sebesar 3,53 %. Sisa anggaran paling banyak di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten yang merupakan gaji dan tunjangan ASN dan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Tabel 3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	14.866.593.850	13.914.055.971	93,59	6,41
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.818.100	136.786.850	99,25	0,75
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.871.466.000	9.999.703.671	91,98	8,02
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.660.000	163.770.000	98,86	1,14
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.708.133.500	1.680.872.082	98,40	1,60
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	977.016.250	934.706.054	95,67	4,33
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.500.000	998.217.314	99,18	0,82
II.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.829.874.430	12.022.199.580	93,70	6,30
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8.165.995.280	7.586.810.400	92,91	7,09
2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.663.879.150	4.435.389.180	95,10	4,90
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	29.394.125.495	29.048.329.817	98,82	1,18
1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.989.839.200	3.903.839.808	97,84	2,16
2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	25.404.286.295	25.144.490.009	98,98	1,02
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	332.985.000	328.531.100	98,66	1.34
1	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	332.985.000	328.531.100	98,66	1.34
V.	Program Penyuluhan Pertanian	6.132.537.920	6.002.546.635	97,88	2.12

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	6.132.537.920	6.002.546.635	97,88	2.12
JUMLAH		63.556.116.695	61.315.663.103	96,47	3.53

1.1.3. Analisis Capaian Kinerja Program

Sasaran dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan indikator produksi pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk sektor tanaman pangan meliputi komoditas padi, jagung dan kedelai. Untuk sektor hortikultura komoditas unggulan meliputi bawang merah, cabai besar, cabai rawit, melon, semangka, pisang, jambu air dan belimbing. Untuk sektor perkebunan komoditas unggulan adalah tebu, tembakau dan kelapa. Adapun target dan realisasi capaian program dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Target Dan Realisasi Capaian Program Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Sat.	Kondisi Awal (2020)	Target 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi 2023	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	100	100	0	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	14	100	0	100	100

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Sat.	Kondisi Awal (2020)	Target 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi 2023	% Capaian
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	1	0	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	0	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	0	5	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	0	4	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%		100	0	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bln	12	14	0	14	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	5	5	0	5	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%		100	0	100	100

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Sat.	Kondisi Awal (2020)	Target 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi 2023	% Capaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	paket		270	0	270	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	0	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	17	22	0	22	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	0	1	0	1	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	0	3	0	3	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	0	3	0	3	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	0	4	0	4	100
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	paket	0	3	0	3	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	12	0	12	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		100	0	100	100
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	0	1	0	1	100

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Sat.	Kondisi Awal (2020)	Target 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi 2023	% Capaian
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	0	12	0	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	0	12	0	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		100	0	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	0	65	0	65	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	unit	0	240	0	240	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya direhabilitasi/dipelihara	unit	0	91	0	91	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direhabilitasi/dipelihara	unit	0	5	0	5	100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian	%	1,5	2	2	6,9	345
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	laporan	0	12	0	12	100

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Sat.	Kondisi Awal (2020)	Target 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi 2023	% Capaian
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	0	12	0	12	100
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	0	4	0	4	100
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan benih bersertifikat untuk komoditas utama	%	0	65	0	65	100
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	0	2	0	2	100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	%	0	3	0	5,6	185
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian	Laporan	0	1	0	1	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	0	10	0	10	100
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	0	20	0	25	125
	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	0	25	0	46	184

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Sat.	Kondisi Awal (2020)	Target 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi 2023	% Capaian
	balai penyuluhan dalam kondisi baik	Unit	0	15	0	15	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	m	0	7.683	0	7.683	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	0	46	0	46	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	0	33	0	33	100
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	%	0	9	0	22,43	249
	Prosentase peningkatan luas pengendalian OPT	%	0	5	0	8,77	175
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	luas lahan yang diasuransikan	Ha	0	1309	0	1495,2	114
	luas pengendalian OPT	Ha	0	5762	0	6451	112
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	ha	-	100	0	100	100

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Sat.	Kondisi Awal (2020)	Target 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi 2023	% Capaian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani naik kelas	%	-	2	0	2,12	106
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kenaikan kelas kelompok tani	Kelompok Tani	-	32	320	32	100
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	0	10	0	10	100
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	0	14	0	14	100
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Unit	-	19	0	19	100
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani dibentuk	Unit	-	1	0	1	100
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang terbentuk dan beroperasi	Unit	-	4	0	4	100

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada urusan pertanian.

Kinerja program dapat dilihat dari program yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi dengan masing – masing indikator. Dinas

Pertanian Kabupaten Grobogan mempunyai program unggulan dalam mendukung pencapaian misi **“Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing”** sesuai nomenklatur yakni Program Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian serta Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program ini selaras dengan program yang dikampanyekan oleh Bupati – Wakil Bupati Terpilih yakni Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian.

1. Urusan Pertanian

Pada urusan pertanian, ada lima program yang dilaksanakan, antara lain Program Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2 %.

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari kegiatan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian. Indikator Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian adalah Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa

Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3 %.

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Indikator Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian adalah Persentase bencana pertanian tertangani. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase bencana pertanian tertangani telah tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5%.

Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari kegiatan Program Penyuluhan Pertanian. Indikator Program Penyuluhan Pertanian adalah Persentase kelompok tani naik kelas. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase kelompok tani telah tercapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 2%.

REALISASI KINERJA KEGIATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			63.556.116.695	61.315.663.103	96,47	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	100	100	100	
	Dana	Rp	14.866.593.850	13.914.055.971	93,59	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	100	100	
	Dana	Rp	137.818.100	136.786.850	99,25	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	1	100	
	Dana	Rp	17.597.500	17.597.500	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	100	
	Dana	Rp	24.990.000	24.990.000	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	100	
	Dana	Rp	55.845.600	54.814.350	98,15	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
	Dana	Rp	39.385.000	39.385.000	100,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	
	Dana	Rp	10.871.466.000	9.999.703.671	91,98	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bln	14	14	100	
	Dana	Rp	10.805.960.000	9.934.287.671	91,93	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	dokumen	5	5	100	
	Dana	Rp	65.506.000	65.416.000	99,86	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	
	Dana	Rp	165.660.000	163.770.000	98,86	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	paket	270	270	100	
	Dana	Rp	165.660.000	163.770.000	98,86	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	
	Dana	Rp	1.708.133.500	1.680.872.082	98,40	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	22	22	100	
	Dana	Rp	50.000.000	46.849.750	93,70	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	1	1	100	
	Dana	Rp	15.000.000	14.997.000	99,98	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	3	3	100	
	Dana	Rp	443.000.000	442.996.800	100,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	3	3	100	
	Dana	Rp	31.000.000	30.983.500	99,95	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	4	4	100	
	Dana	Rp	20.000.000	16.180.000	80,90	

Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	paket	3	3	100	
	Dana	Rp	200.000.000	179.774.800	89,89	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100	
	Dana	Rp	949.133.500	949.090.232	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	
	Dana	Rp	977.016.250	934.706.054	95,67	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	1	100	
	Dana	Rp	5.000.000	5.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	12	100	
	Dana	Rp	434.000.000	396.943.554	91,46	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	12	100	
	Dana	Rp	538.016.250	532.762.500	99,02	

Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	100	100	
	Dana	Rp	1.006.500.000	998.217.314	99,18	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Bi aya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	65	65	100	
	Dana	Rp	142.100.000	138.521.691	97,48	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	unit	240	240	100	
	Dana	Rp	62.900.000	62.897.900	100,00	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya direhabilitasi/d ipelihara	unit	91	91	100	
	Dana	Rp	200.000.000	199.419.848	99,71	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direhabilitasi/d ipelihara	unit	5	5	100	
	Dana	Rp	601.500.000	597.377.875	99,31	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian	%	2	6,9	345	
	Dana	Rp	12.829.874.430	12.022.199.580	93,70	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	laporan	12	12	100	
	Dana	Rp	8.165.995.280	7.586.810.400	92,91	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12	12	100	
	Dana	Rp	5.597.251.500	5.358.586.600	95,74	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	4	100	
	Dana	Rp	2.568.743.780	2.228.223.800	86,74	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan benih bersertifikat untuk komoditas utama	%	65	65	100	
	Dana	Rp	4.663.879.150	4.435.389.180	95,10	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	2	100	
	Dana	Rp	4.663.879.150	4.435.389.180	95,10	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	%	3	5,6	185	
	Dana	Rp	29.394.125.495	29.048.329.817	98,82	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian	Laporan	1	1	100	
	Dana	Rp	3.989.839.200	3.903.839.808	97,84	
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	10	10	100	
	Dana	Rp	3.989.839.200	3.903.839.808	97,84	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	20	20	100	
	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	25	25	100	
	balai penyuluhan dalam kondisi baik	Unit	16	16	100	
	Dana	Rp	25.404.286.295	25.144.490.009	98,98	

Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	m	7.683	7.683	100	
	Dana	Rp	7.186.500.000	7.177.950.229	99,88	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	34	34	100	
	Dana	Rp	9.320.491.720	9.288.726.407	99,66	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	46	46	100	
	Dana	Rp	8.897.294.575	8.677.813.373	97,53	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	%	9	22,43	249	
	Prosentase peningkatan luas pengendalian OPT	%	5	8,77	175	
	Dana	Rp	332.985.000	328.531.100	98,66	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	luas lahan yang diasuransikan	Ha	1309	1495,2	114	
	luas pengendalian OPT	Ha	5762	6451	112	
	Dana	Rp	332.985.000	328.531.100	98,66	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	ha	100	100	100	
	Dana	Rp	332.985.000	328.531.100	98,66	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani naik kelas	%	2	2,12	106	
	Dana	Rp	6.132.537.920	6.002.546.635	97,88	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kenaikan kelas kelompok tani	Kelompok Tani	32	32	100	
	Dana	Rp	6.132.537.920	6.002.546.635	97,88	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	10	10	100	
	Dana	Rp	293.500.000	285.081.950	97,13	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	14	14	100	
	Dana	Rp	553.999.600	541.092.000	97,67	

Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	Kegiatan				% Capaian	Ket.
	Indikator	Sat.	Target	Realisasi		
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Unit	19	19	100	
	Dana	Rp	3.970.256.250	3.894.409.405	98,09	
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani dibentuk	Unit	1	1	100	
	Dana	Rp	581.791.750	562.344.380	96,66	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang terbentuk dan beroperasi	Unit	4	4	100	
	Dana	Rp	732.990.320	719.618.900	98,18	

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, pada tahun anggaran 2023, yaitu:

Target Pendapatan

Pada Tahun 2023, Dinas Pertanian ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 307.283.000,-, dan sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi pendapatan telah melebihi target yaitu sebesar Rp. 309.863.000,- selisih Rp. 2.580.000,- atau tercapai sebesar 100, 83 %. Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	%
1	Restribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	45.000.000	45.000.000	0	100
2	Retribusi Penyewaan Tanah	12.283.000	12.283.000	0	100
3	Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	250.000.000	252.580.000	2.580.000	101,03
Jumlah		307.283.000	309.863000	2.580.000	100,83

Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian pendapatan Tahun 2023 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Target pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 307.283.000,00 dan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 309.863000, sehingga terdapat selisih pendapatan sebesar Rp. 2.580.000. Kenaikan pendapatan tersebut dari hasil penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman.

Pelaksanaan APBD Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 63.556.116.695,- dari dana APBD dan DAK, dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 61.315.663.103,- (96,47%), dan sisa anggaran sebanyak Rp. 2.240.453.592,- (3,53%).

Tabel. 3.7**Perincian Anggaran/Target Dan Realisasi Belanja :**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
DINAS PERTANIAN	63.556.116.695	61.315.663.103	96,47	2.240.453.592
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.866.593.850	13.914.055.971	93,59	952.537.879
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.818.100	136.786.850	99,25	1.031.250
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.597.500	17.597.500	100,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.990.000	24.990.000	100,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.845.600	54.814.350	98,15	1.031.250
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.385.000	39.385.000	100,00	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.871.466.000	9.999.703.671	91,98	871.762.329
Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	10.805.960.000	9.934.287.671	91,93	871.672.329
Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	65.506.000	65.416.000	99,86	90.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.660.000	163.770.000	98,86	1.890.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.660.000	163.770.000	98,86	1.890.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.708.133.500	1.680.872.082	98,40	27.261.418
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	46.849.750	93,70	3.150.250
Penyediaan Peralatan RumahTangga	15.000.000	14.997.000	99,98	3.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	443.000.000	442.996.800	100,00	3.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.000	30.983.500	99,95	16.500
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	20.000.000	16.180.000	80,90	3.820.000
Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	179.774.800	89,89	20.225.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	949.133.500	949.090.232	100,00	43.268
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	977.016.250	934.706.054	95,67	42.310.196
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00	0
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	434.000.000	396.943.554	91,46	37.056.446
Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	538.016.250	532.762.500	99,02	5.253.750

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.500.000	998.217.314	99,18	8.282.686
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.100.000	138.521.691	97,48	3.578.309
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.900.000	62.897.900	100,00	2.100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	199.419.848	99,71	580.152
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	601.500.000	597.377.875	99,31	4.122.125
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.829.874.430	12.022.199.580	93,70	807.674.850
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8.165.995.280	7.586.810.400	92,91	579.184.880
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.597.251.500	5.358.586.600	95,74	238.664.900
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.568.743.780	2.228.223.800	86,74	340.519.980
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.663.879.150	4.435.389.180	95,10	228.489.970
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4.663.879.150	4.435.389.180	95,10	228.489.970
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	29.394.125.495	29.048.329.817	98,82	345.795.678
Pengembangan Prasarana Pertanian	3.989.839.200	3.903.839.808	97,84	85.999.392
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	3.989.839.200	3.903.839.808	97,84	85.999.392
Pembangunan Prasarana Pertanian	25.404.286.295	25.144.490.009	98,98	259.796.286
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	7.186.500.000	7.177.950.229	99,88	8.549.771
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9.320.491.720	9.288.726.407	99,66	31.765.313
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	8.897.294.575	8.677.813.373	97,53	219.481.202
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	332.985.000	328.531.100	98,66	4.453.900
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	332.985.000	328.531.100	98,66	4.453.900

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	332.985.000	328.531.100	98,66	4.453.900
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6.132.537.920	6.002.546.635	97,88	129.991.285
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	6.132.537.920	6.002.546.635	97,88	129.991.285
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	293.500.000	285.081.950	97,13	8.418.050
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa	553.999.600	541.092.000	97,67	12.907.600
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.970.256.250	3.894.409.405	98,09	75.846.845
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	581.791.750	562.344.380	96,66	19.447.370
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	732.990.320	719.618.900	98,18	13.371.420

3.3. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi Yang telah Dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada Tahun 2023 ini mencapai 99%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai sesuai target. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari capaian yang berkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada awal Tahun 2023.
- Perencanaan dari masing –masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai.
- Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

- d. Telah dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang terkait dengan realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak fokus kepada hasil.
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik dan media sosial lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- f. Pencapaian target produksi juga didukung oleh 5 program dan 12 kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2023. Kegiatan yang secara langsung mendukung untuk capaian indikator ini antara lain Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Sementara penyebab eksternal yang mendukung keberhasilan pencapaian program / kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan antara lain:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari stakeholder terkait seperti Kelompok Tani, Gapoktan P3A, GP3A, KWT, pengecer pupuk, produsen benih dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.
- b. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Pertanian dalam bentuk bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan fasilitasi sarana produksi dan kegiatan yang mendukung pengembangan pertanian di Kabupaten Grobogan. Termasuk kegiatan yang bersumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pertanian yang fokus pada pembangunan sarana / infrastruktur pertanian untuk pemenuhan kebutuhan air bagi petani. Kegiatannya itu sendiri berupa pembangunan irigasi air tanah dalam, dam parit, long storage, dan embung, jalan pertanian dan alsintan pasca panen.

Selain terdapat penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja, juga terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai target kinerja untuk beberapa indikator capaian. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Masih kurangnya sumberdaya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Banyaknya tenaga penyuluh yang memasuki masa pensiun sehingga kegiatan penyuluhan belum bisa optimal sesuai dengan kebutuhan petani. Jumlah Penyuluh Pertanian yang memiliki peran sangat besar dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Grobogan semakin berkurang. Agar pemberdayaan petani dan kelompok tani dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilaksanakan rekrutmen penyuluh swadaya yang berasal dari petani yang sukses dalam melakukan kegiatan usaha taninya, sehingga diharapkan dapat menjadi contoh bagi petani di sekitar mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis 2022 – 2026 dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2023 tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sudah cukup baik walaupun ada beberapa target yang tidak tercapai dikarenakan kendala iklim kemarau yang panjang dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (80% s/d 100%) kegiatan yang ada di Dinas Pertanian tahun 2023 dapat dilaksanakan semuanya.
- b. Realisasi pendapatan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 309.863000,- dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 307.283.000,-, terdapat selisih kelebihan pendapatan yaitu sebesar Rp. 2.580.000,-.
- c. Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan. Sisa anggaran tersebut sebagian besar berasal dari sisa kontrak, adapun untuk yang sisa kontrak adalah merupakan hal wajar, disamping itu sisa anggaran yang ada berasal dari kegiatan yang mengalami pengedropan dan pengurangan anggaran. Hal tersebut berarti terjadi efisiensi dari anggaran yang disediakan.

B. Saran

Secara ringkas capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara optimal dari berbagai pihak terutama Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan dapat dikatakan cukup baik. Selain itu, agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah di capai, diharapkan adanya kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, diantaranya perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Perbaikan perencanaan program dan kegiatan dan estimasi penggunaan anggaran yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi teknis baik internal maupun dengan instansi terkait atau lintas sektoral dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan. Dengan koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
3. Perlu diusahakan sarana dan prasarana pelaksanaan program dan kegiatan guna menunjang operasional kegiatan.
4. Perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara kontinyu untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya. Dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak menemui kendala dan masih terdapat banyak

kekurangan, namun demikian diharapkan LKjIP ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sesuai Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

5. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penanaman bibit serta kegiatan pembangunan fisik di lapangan kadang masih terkendala karena perubahan musim yang tidak pasti maka dalam menjadwalkan kegiatan di lapangan harus lebih cermat.
6. Perlu adanya survey lokasi secara spesifik sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Lokasi kegiatan di lapangan biasanya menyebar sehingga diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
8. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bangunan fisik selama ini masih kurang mampu dalam teknis konstruksi, maka untuk pelaksanaan kegiatan diperlukan adanya konsultan perencanaan dan konsultan pengawas kegiatan.
9. Banyaknya pengajuan proposal yang berkaitan dengan infrastruktur pertanian maka diperlukan penyebaran dan pentahapan lokasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.